

## Surat Berharga Negara dan Pengaruhnya Terhadap Belanja Modal Pemerintah, Produk Domestik Bruto, dan Kemiskinan

Angga Oktapriyono<sup>1</sup>, Cris Kuntadi<sup>2</sup>, Luki Karunia<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Politeknik STIA LAN, Jakarta, e-mail [okta\\_angga@rocketmail.com](mailto:okta_angga@rocketmail.com)

<sup>2</sup>Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Jakarta, e-mail

[cris.kuntadi@dsn.ubharajaya.ac.id](mailto:cris.kuntadi@dsn.ubharajaya.ac.id)

<sup>3</sup>Politeknik STIA LAN, Jakarta, e-mail [karunialuki@yahoo.com](mailto:karunialuki@yahoo.com)

*\*Corresponding Author : Angga Oktapriyono<sup>1</sup>*

---

**Abstrak** : Perkembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) beberapa tahun terakhir selalu dalam posisi defisit. Defisit anggaran tersebut dapat ditutupi salah satunya melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN). Artikel ini merupakan *Literature Review* untuk mengetahui pengaruh penerbitan SBN terhadap perekonomian negara. Artikel ini memperlihatkan bagaimana SBN mempengaruhi belanja modal pemerintah, Produk Domestik Bruto (PDB), dan kemiskinan.

**Keyword** : SBN, Belanja Modal Pemerintah, PDB, Kemiskinan

---

### PENDAHULUAN

#### Latar Belakang Masalah

Menurut Kuntadi (2022), Ada 4 pendekatan dalam melakukan perumusan keuangan negara, antara lain :

#### 1. Objek

Hak dan kewajiban negara yang dapat diukur dengan nilai uang. Seluruh kebijakan dan keputusan dalam bidang fiskal, moneter, kekayaan negara yang dipisahkan, baik dalam bentuk uang ataupun barang yang dapat dijadikan dan diakui sebagai milik negara untuk melaksanakan hak dan kewajiban tersebut.

#### 2. Subjek

Seluruh *stakeholder* yang terkait dengan manajemen objek keuangan yang dimiliki negara, dan/atau dikuasai pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/D), serta badan lain yang terkait dengan keuangan negara.

#### 3. Proses

Seluruh kegiatan yang terkait dengan manajemen objek keuangan negara mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban.

#### 4. Tujuan

Kebijakan, kegiatan, dan hubungan hukum yang berkaitan dengan kepemilikan dan/atau penguasaan atas objek keuangan negara dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

Salah satu objek perumusan keuangan negara adalah kebijakan fiskal. Kebijakan tersebut dikeluarkan oleh pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar penduduk seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan lain sebagainya yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Instrumen kebijakan fiskal yang dapat dilakukan pemerintah salah satunya dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, APBN adalah sebuah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dalam menjalankannya, pemerintah memerlukan anggaran dalam jumlah besar, yang terkadang terjadi ketidakseimbangan antara pendapatan dan belanja, sehingga terjadi defisit anggaran.

**Tabel 1. Perkembangan Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2017-2022 (Triliun Rupiah)**

| Tahun | Pendapatan | Belanja  | Defisit | PDB       | Defisit Terhadap PDB |
|-------|------------|----------|---------|-----------|----------------------|
| 2017  | 1.666,37   | 2.007,35 | 340,97  | 13.589,83 | 2,51%                |
| 2018  | 1.943,67   | 2.213,11 | 269,44  | 14.838,76 | 1,82%                |
| 2019  | 1.960,63   | 2.309,28 | 348,65  | 15.832,66 | 2,20%                |
| 2020  | 1.647,78   | 2.595,48 | 947,69  | 15.443,35 | 6,14%                |
| 2021  | 2.011,34   | 2.786,41 | 775,06  | 16.976,69 | 4,57%                |
| 2022  | 2.635,84   | 3.106,42 | 460,42  | 19.588,44 | 2,35%                |

*Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Audited, Badan Pusat Statistik, Kementerian Perdagangan 2017-2022 (diolah)*

Dari tabel diatas, terlihat bahwa pada tahun 2017 – 2022 anggaran pemerintah selalu defisit dengan nilai yang berfluktuatif, dengan nilai defisit terbesar pada tahun 2020 sebesar Rp. 947,69 Triliun. Terlihat bahwa nilai PDB selalu meningkat dari tahun ketahun kecuali pada tahun 2022 terjadi sedikit penurunan dengan nilai terbesar pada tahun 2022 sebesar Rp. 19.588,44 triliun. Perkembangan defisit anggaran mengalami peningkatan ketika terjadi pandemi covid-19, dalam rentang tahun 2019-2020 mengalami peningkatan dan pada tahun 2021-2022 mengalami penurunan seiring dengan selesainya pandemi covid-19.

Dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 12 Ayat 3 dijelaskan bahwa maksimal defisit anggaran yang diperbolehkan adalah sebesar 3% dari PDB. Akan tetapi pengecualian pada kondisi khusus seperti ketika terjadi wabah covid-19 dimana diterbitkan Undang-undang No. 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Pada UU No. 2 Tahun 2020 defisit anggaran dapat melebihi 3% dari PDB, tetapi hal tersebut dibatasi hanya sampai tahun 2023.

Untuk menutupi defisit anggaran tersebut, pemerintah memerlukan pembiayaan agar pembangunan dapat tetap berjalan. Salah satu pembiayaan yang digunakan oleh pemerintah adalah penerbitan Surat Berharga Negara (SBN).

**Tabel 2. *Outstanding SBN Tahun 2017-2022 (Triliun Rupiah)***

| Tahun | Outstanding SBN |
|-------|-----------------|
| 2017  | 2.152,89        |
| 2018  | 2.421,84        |
| 2019  | 2.820,58        |
| 2020  | 3.926,57        |
| 2021  | 4.723,87        |
| 2022  | 5.365,24        |

*Sumber : Bank Indonesia (diolah)*

Berdasarkan tabel diatas, dari tahun 2017 sampai dengan 2022, nilai SBN selalu meningkat. hal ini mengindikasikan bahwa SBN merupakan pilihan pemerintah sebagai penutup defisit anggaran. Peningkatan terbesar terjadi pada tahun 2020, dari Rp. 2.820,58 Triliun menjadi Rp. 3.926,57 Triliun, meningkat Rp. 1.105,Triliun.

Dengan SBN yang terus meningkat, tentu menjadi pertanyaan, sejauh mana SBN mampu memberikan dampak positif bagi kondisi perekonomian negara. Artikel ini akan mengulas bagaimana pengaruh SBN terhadap belanja modal pemerintah, PDB, dan kemiskinan.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang, perumusan masalah yang akan dibahas dalam artikel ini antara lain :

1. Bagaimana pengaruh SBN terhadap belanja modal pemerintah?
2. Bagaimana pengaruh SBN terhadap produk domestik bruto?
3. Bagaimana pengaruh SBN terhadap kemiskinan?

### **KAJIAN TEORI**

#### **1. Surat Berharga Negara**

Surat berharga atau yang juga dikenal dengan sebutan obligasi merupakan surat utang yang memiliki jangka waktu tertentu. Obligasi adalah surat berharga dengan 2 jenis jangka waktu, yaitu jangka menengah dan jangka panjang. Obligasi juga merupakan sebuah pengakuan utang dari penerbit dan dapat diperdagangkan. Pembeli obligasi atau bisa disebut sebagai investor, adalah kreditur yang memberikan pinjaman dengan nilai nominal tertentu kepada debitur atau penerbit sesuai dengan jangka waktu yang sudah ditentukan (Sitorus, 2015).

Pemerintah dapat menerbitkan surat berharga yang disebut dengan SBN. SBN yang ada di Indonesia memiliki 2 jenis, yaitu:

a. Surat Utang Negara (SUN)

Menurut Undang-undang No. 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara, SUN adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya. SUN terdiri atas :

1. Surat Perbendaharaan Negara, memiliki jangka waktu sampai dengan 12 bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto;
2. Obligasi Negara, memiliki jangka waktu lebih dari 12 bulan dengan kupon dan/atau dengan pembayaran bunga secara diskonto.

Penerbitan SUN ditujukan untuk membiayai defisit APBN, menutup kekurangan kas jangka pendek akibat ketidaksesuaian antara arus kas penerimaan dan pengeluaran dari rekening kas negara dalam satu tahun anggaran, dan untuk mengelola portofolio utang negara.

b. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)

Menurut Undang-undang No. 19 Tahun 2008, SBSN atau dapat disebut Sukuk Negara, adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap Aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Aset SBSN itu sendiri adalah objek pembiayaan SBSN dan/atau Barang Milik Negara yang memiliki nilai ekonomis, berupa tanah dan/atau bangunan maupun selain tanah dan/atau bangunan, yang dalam rangka penerbitan SBSN dijadikan sebagai dasar penerbitan SBSN.

Sama dengan SUN, SBSN memiliki tujuan penerbitannya, yaitu untuk membiayai APBN. Perbedaan antara SUN dan SBSN adalah dari prinsip pengelolaannya, dimana pengelolaan SBSN wajib dilakukan sesuai prinsip syariah. Balibek dalam Sari (2021) mengungkapkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir beberapa negara baik yang mayoritas muslim maupun yang bukan telah menerbitkan sukuk, setara dengan obligasi dalam keuangan Islam. Pemerintah menerbitkan sukuk untuk memenuhi kebutuhan keuangan, untuk mendiversifikasi investor, untuk mempromosikan tujuan keuangan yang inklusif, dan untuk menegaskan status negara sebagai pusat keuangan. Walaupun sukuk memiliki dampak keuangan yang serupa dengan obligasi konvensional tetapi secara prinsip sukuk berbeda dengan obligasi. Sukuk bergantung pada transfer kepemilikan atau manfaat penggunaan dari aset yang mendasarinya dan strukturnya harus sesuai dengan hukum Islam atau syariah.

## 2. Belanja Modal Pemerintah

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menjelaskan bahwa belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Rincian lebih lanjut mengenai belanja modal diuraikan dalam Buletin Teknis 03: Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah. Aset tetap mempunyai ciri-ciri/ karakteristik berwujud, akan menambah aset pemerintah, mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun, nilainya relatif material

Sedangkan ciri-ciri/ karakteristik Aset Lainnya adalah tidak berwujud, akan menambah aset pemerintah, mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun, nilainya relatif material. Berdasarkan ciri-ciri/ karakteristik tersebut, diharapkan entitas dapat menetapkan kebijakan akuntansi mengenai batasan minimal nilai kapitalisasi suatu aset tetap atau aset lainnya, sehingga pejabat/aparat penyusun anggaran dan/atau penyusun laporan keuangan pemerintah mempunyai pedoman dalam penetapan belanja modal baik pada waktu penganggaran maupun pelaporan keuangan pemerintah.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa suatu belanja dapat dikategorikan sebagai Belanja Modal jika:

- a. pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset lainnya yang dengan demikian menambah aset pemerintah;
- b. pengeluaran tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang telah ditetapkan oleh pemerintah;
- c. perolehan aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual.

Menurut Halim (2004), belanja modal merupakan belanja yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah serta akan menimbulkan konsekuensi menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan.

### **Produk Domestik Bruto**

Menurut Prawoto (2019), PDB adalah total dari seluruh produk baik barang maupun jasa yang telah diproduksi oleh suatu negara dalam jangka waktu satu tahun, di dalamnya meliputi produk yang diproduksi oleh warga Negara asing (WNA) dan perusahaan asing yang melakukan proses produksi di Negara tersebut. Dalam perhitungannya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu PDB menurut harga berlaku (*current price*) dan PDB menurut harga konstan (*constant price*). Menurut harga berlaku dikalkulasi berdasarkan harga berlaku saat penghitungan PDB dilakukan, sedangkan menurut harga konstan dihitung berdasarkan harga tahun tertentu yang ditetapkan oleh otoritas/pemerintah, sehingga mengabaikan perubahan harga-harga barang dan jasa atau mengabaikan inflasi. PDB menurut harga konstan juga disebut PDB riil, karena perubahan jumlah nilai PDB tersebut disebabkan secara riil oleh jumlah produksi karena perubahan harga.

PDB adalah nilai barang dan jasa akhir berdasarkan harga pasar, yang diproduksi oleh sebuah perekonomian dalam suatu periode (kurun waktu) dengan menggunakan faktor-faktor produksi yang berada (berlokasi) dalam perekonomian (Raharja dan Manurung, 2008).

### **Kemiskinan**

Menurut Suparmono (2018), seperti halnya pengangguran, kemiskinan (*poverty*) merupakan masalah yang dihadapi oleh seluruh negara, terutama di negara berkembang. Masalah kemiskinan merupakan suatu yang kompleks, baik dilihat dari penyebabnya maupun dilihat dari ukurannya. Hal ini dikarenakan kemiskinan bersifat *multidimensional*, artinya kemiskinan menyangkut seluruh dimensi kebutuhan manusia yang sifatnya sangat beragam. Selain itu, dimensi kebutuhan manusia yang beraneka ragam itupun saling terkait satu dengan lainnya.

**Tabel 3. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

| No | Author (tahun)                                         | Hasil Riset                                                                                                                                  | Persamaan Dengan Artikel Ini                             | Perbedaan Dengan Artikel Ini                                                                                                  |
|----|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Badrul Arifin dan Dimas Wisnu Ashari (2023)            | Pengaruh SBN Terhadap Tingkat Kemiskinan                                                                                                     | Pengaruh SBN Terhadap Tingkat Kemiskinan                 | -                                                                                                                             |
| 2  | Cut Idi Keumala Dewi dan Chenny Seftarita (2018)       | Pengaruh Surat Utang Negara (SUN) Terhadap PDB dan Inflasi                                                                                   | Pengaruh SBN Terhadap PDB                                | Pengaruh SBN Terhadap Inflasi                                                                                                 |
| 3  | Khavid Normasyhuri, Budimansyah dan Eko Triyadi (2022) | Pengaruh SUN dan SBSN Terhadap Pertumbuhan Ekonomi                                                                                           | -                                                        | Pengaruh SBN Terhadap Pertumbuhan Ekonomi                                                                                     |
| 4  | Novia Aristawidya dan Astri Fitria (2022)              | Pengaruh SUN dan SBSN Terhadap Pertumbuhan Ekonomi                                                                                           | -                                                        | Pengaruh SBN Terhadap Pertumbuhan Ekonomi                                                                                     |
| 5  | Bambang Juanda dan Syadza Gladiola (2022)              | Pengaruh SBN Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Terhadap Belanja Pegawai, Belanja Modal, Belanja Subsidi dan Belanja Transfer Ke Daerah dan Desa) | Pengaruh SBN Terhadap Belanja Pemerintah (Belanja Modal) | Pengaruh SBN Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Terhadap Belanja Pegawai, Belanja Subsidi dan Belanja Transfer Ke Daerah dan Desa) |
| 6  | Siti Latifah (2020)                                    | Pengaruh SBSN Terhadap Pertumbuhan Pembangunan Ekonomi dalam Pembiayaan Infrastruktur (Belanja Modal)                                        | Pengaruh SBN Terhadap Belanja Pemerintah (Belanja Modal) | -                                                                                                                             |

## **METODE PENULISAN**

Metode penulisan artikel ilmiah didasarkan pada penggunaan metode kualitatif dan penelitian kepustakaan. Menguji teori dan hubungan atau pengaruh antar variabel dari buku dan jurnal baik *offline* di perpustakaan maupun *online* dari Mendeley, Google Scholar, dan media online lainnya

Dalam penelitian kualitatif, kajian pustaka harus digunakan secara konsisten dengan asumsi-asumsi metodologis. Artinya harus digunakan secara induktif sehingga tidak mengarahkan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Salah satu alasan utama untuk melakukan penelitian kualitatif yaitu bahwa penelitian tersebut bersifat eksploratif, (Ali & Limakrisna, 2013).

## **PEMBAHASAN**

Pembahasan artikel ini berdasarkan kajian teori dan juga penelitian terdahulu yang masih relevan terhadap permasalahan yang diungkapkan.

### **1. Pengaruh SBN Terhadap Belanja Pemerintah (Belanja Modal)**

Penelitian yang dilakukan oleh Latifah (2020), menjelaskan bahwa penerbitan Sukuk Negara dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, sesuai dengan perkembangan dan strategi yang diterapkan dalam APBN.

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Sukuk Ritel (SR) yaitu SR 001, SR 002, SR 003, SR 004, SR 005, SR 006, SR 007, SR 008, SR 009, SR 010, SR 011, SR 012, dan SR 013. Penerbitan Sukuk Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sangat bermanfaat bagi Indonesia dalam hal menambah pendapatan APBN. Penambahan biaya APBN digunakan untuk pembangunan proyek dari sektor energi, telekomunikasi, perhubungan, pertanian, industri manufaktur, dan perumahan.

Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Juanda dan Gladiola (2022). Dalam penelitiannya, hasil pengujian variabel SBN berpengaruh terhadap pertumbuhan belanja modal pemerintah dimana setiap kenaikan 1% pertumbuhan SBN, maka akan meningkatkan atau mendorong pertumbuhan belanja modal sebesar 0,69%. Sedangkan pengaruh pertumbuhan SBN memiliki pengaruh negatif terhadap pertumbuhan belanja. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pembiayaan yang dihasilkan dari penerbitan SBN digunakan untuk belanja yang produktif yaitu belanja modal.

### **1. Pengaruh SBN Terhadap PDB**

Dalam penelitiannya, Aristawidya dan Fitria (2022) menggunakan pertumbuhan PDB sebagai parameter pertumbuhan ekonomi. Penelitiannya membagi 2 SBN yaitu SUN dan SBSN. Hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa :

- a. Penerbitan SUN oleh pemerintah memiliki korelasi positif terhadap pertumbuhan ekonomi, ketika penerbitan SUN meningkat, maka pertumbuhan ekonomi juga akan meningkat. Hasil yang diperoleh dari penerbitan SUN, merupakan instrumen yang digunakan oleh pemerintah sebagai pembiayaan untuk menutupi defisit anggaran. Penerbitan SUN ditujukan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang produktif, salah satunya adalah pembangunan infrastruktur melalui BUMN. Beberapa proyek yang dibangun antara lain ruas jalan tol, ketenagalistrikan, komunikasi, dan sarana prasarana

pelabuan sebagai pendorong meningkatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan utang pemerintah yang dihimpun melalui instrumen SUN telah dialokasikan pada sektor-sektor yang produktif, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

- b. Jika SUN berkorelasi positif, justru SBSN berkorelasi negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Setiap peningkatan ataupun adanya penurunan SBSN tidak memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Jumlah dana yang didapat atas penerbitan SBSN yang tidak sebanyak dana yang didapatkan dari penerbitan SUN merupakan salah satu faktor yang menyebabkan SBSN tidak memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Disamping itu, *underlying asset* diperlukan dalam penerbitan SBSN sebagai dasar atas penerbitannya. Sedangkan SUN tidak memerlukan *underlying asset* dalam penerbitannya, *underlying asset* yang digunakan dalam hal ini adalah Barang Milik Negara (BMN). Dalam menentukan BMN yang akan dijadikan *underlying asset* penerbitan SBSN, diperlukan persetujuan menteri keuangan sebagai pengelola barang melalui keputusan menteri keuangan.

Dari kedua hasil tersebut, SUN paling berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi (peningkatan PDB). Hasil tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Seftarita (2018) dimana setiap peningkatan SUN akan meningkatkan nilai PDB.

### 1. Pengaruh SBN Terhadap Kemiskinan

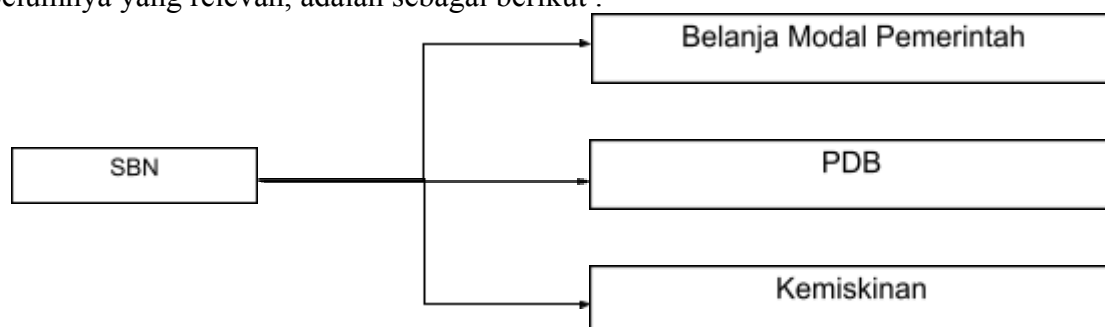
Hasil dari regresi linier berganda yang dilakukan dalam penelitian Arifin dan Ashari (2023) menunjukkan bahwa pengaruh kenaikan SBN terhadap anggaran bantuan sosial memiliki korelasi yang positif, dan hasil dari regresi linier terhadap anggaran bantuan sosial dan kemiskinan berkorelasi negatif.

Dari hasil penelitiannya juga mengatakan bahwa anggaran bantuan sosial lebih berpengaruh di desa terhadap kemiskinan dibandingkan di kota. Meskipun SBN mampu menurunkan persentase warga miskin di Indonesia, kewaspadaan terhadap rasio fiskal yang melemah dikarenakan meningkatnya kewajiban negara juga harus ditingkatkan. Selain itu, optimalisasi program pengentasan kemiskinan pada wilayah kota harus disesuaikan lagi agar lebih efektif mengurangi kemiskinan penduduk kota.

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Sinaga, Lubis dan Situmorang (2022), bahwa anggaran pemerintah yang dikeluarkan berupa anggaran bantuan sosial berpengaruh signifikan pada tingkat kemiskinan yang terjadi.

### Kerangka Konseptual

Kerangka berpikir yang dihasilkan dari rumusan masalah, kajian teori dan penelitian sebelumnya yang relevan, adalah sebagai berikut :



### **Gambar 1. Kerangka Konseptual**

Berdasarkan gambar kerangka konseptual diatas, SBN mempengaruhi belanja pemerintah (belanja modal), PDN dan kemiskinan. Selain ketiga variabel tersebut, SBN mempengaruhi beberapa variabel lain, diantaranya :

1. Inflasi (Dewi dan Seftarita, 2018);
2. Pertumbuhan Ekonomi (Normansyah, Budimansyah dan Triyadi, 2022) ( Aristawidya dan Fitria, 2022);
3. Belanja Pegawai Pemerintah (Juanda dan Gladiola, 2022);
4. Belanja Subsidi Pemerintah (Juanda dan Gladiola, 2022);
5. Belanja Transfer Ke Daerah dan Desa (TKDD) dari Pemerintah Pusat (Juanda dan Gladiola, 2022).

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **Kesimpulan**

Hasil dari *literature review* yang dilakukan berdasarkan teori, artikel dan/atau penelitian terdahulu yang relevan, serta pembahasan, dapat dirumuskan hipotesis untuk penelitian selanjutnya ialah :

1. SBN mempengaruhi Belanja Modal Pemerintah;
2. SBN mempengaruhi PDB;
3. SBN mempengaruhi Kemiskinan.

#### **Saran**

Artikel ini memperlihatkan bagaimana pengaruh SBN terhadap perekonomian negara terutama dalam belanja modal pemerintah, PDB dan kemiskinan. Tetapi perlu dicermati bahwa artikel ini memiliki keterbatasan hanya berdasarkan *literatur review* dan penelitian yang memiliki perbedaan waktu ataupun lokasi. Atas dasar tersebut, perlu dilakukan penelitian secara menyeluruh dengan waktu dan lokasi yang sama agar mendapatkan hasil penelitian yang lebih dalam dan akurat.

Selain itu, untuk kajian selanjutnya perlu mencari faktor-faktor atau variabel lainnya yang dipengaruhi oleh penerbitan SBN oleh pemerintah, seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, belanja pemerintah lainnya berupa belanja pegawai, belanja subsidi dan belanja TKDD.

## Daftar Rujukan

- Arifin, B & Ashari, DW. (2023). Analisis Pengaruh Pembiayaan Surat Berharga Negara (SBN) Terhadap Tingkat Kemiskinan Indonesia: Masa Normal dan Masa Pandemi Covid-19 (2020-2022). *Jurnal Budget: Isu dan Masalah Keuangan Negara*, 8(1), 85-99
- Aristawidya, Novia dan Fitria Astri. (2022). Pengaruh Dana Investasi Melalui Instrumen SUN dan SBSN Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*
- Badan Pusat Statistik. (2022). Produk Domestik Bruto Indonesia Menurut Pengeluaran 2017-2021. Jakarta : Badan Pusat Statistik
- Bank Indonesia. (2023). Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia. Diakses pada 2 September 2023, dari <https://www.bi.go.id/id/statistik/ekonomi-keuangan/seki/default.aspx>
- Halim, Abdul. (2004). Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat
- Juanda, B. & Gladiola, S. (2022). Analisis keberlanjutan serta pengaruh surat berharga negara dan faktor lainnya terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 7(3), 239-254
- Kementerian Perdagangan. (2023). Produk Domestik Bruto. Diakses pada 25 Agustus 2023, dari <https://satudata.kemendag.go.id/data-informasi/perdagangan-dalam-negeri/produk-domestik-bruto>
- Kuntadi, Cris. (2022). Audit Keuangan Negara. Jakarta: Salemba Empat
- Latifah, S. (2020). Peran Sukuk Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dalam Pertumbuhan Pembangunan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(03), 421-427. doi:<http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1369>
- Muchtalifah. (2010). Ekonomi Makro. Surabaya: Unesa University Press
- Prawoto, Nano. 2019. Pengantar Ekonomi Makro. Depok: Raja Grafindo Persada
- Rahardja, P., & Manurung. (2008). Pengantar Ilmu Ekonomi (Mikroekonomi & Makroekonomi) Edisi Ketiga. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Sari, Iga Trisna Nurma. (2021). Usulan Perbaikan Penggunaan Barang Milik Negara Sebagai Dasar (Underlying Asset) Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (Studi Kasus

Pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Negara). Tesis Magister, Program Studi Magister Akuntansi Universitas Indonesia, Depok

- Sinaga, E., Lubis, T., Situmorang, E., dan Harahap, A. (2022). Dampak Program Perlindungan Sosial terhadap Kemiskinan di Sumatra Utara. *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*, 3(2), 116-131. <https://doi.org/https://doi.org/10.33105/jmp.v3i2.416>
- Sitorus, Tarmiden. (2015). *Pasar Obligasi Indonesia: Teori dan Praktek*. Depok: Rajagrafindo Persada
- Suparmono. (2018). *Pengantar Ekonomi Makro Teori, Soal dan Penyelesaiannya*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN